



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS VIII SMP NEGERI 4 KOTA TERNATE

Wa Ode Desti Ramadani¹, Wahyudin Noe², Nani Rajaloo³
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

artikelwaodedestiramadani@gmail.com
wahyudinnoe@unhair.ac.id
nanirajaloo@yahoo.co.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima (Mei) (2022)
Disetujui (Mei) (2022)
Dipublikasikan (Mei) (2022)

Keywords

Implementasi, Nilai-Nilai Demokrasi, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kepedulian peneliti terhadap nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu sarana dalam membangun karakter demokratis peserta didik yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Ternate. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh terkait: (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn; (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimana teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn, diantaranya: a) membiasakan peserta didik untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap tugas kelompok, b) melalui diskusi kelompok, peserta didik diberi ruang untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, berpikir kritis, berani, terbuka, dan percaya diri, saling menghargai pendapat atau keberagaman, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, c) mendorong dan menjamin kebebasan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua PMR, ketua Pramuka, dan lain sebagainya; (2) Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu: a) adanya pendidik yang memiliki kompetensi baik kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, maupun sosial.; b) anak didik yang memiliki keseriusan untuk pengembangan kompetensinya; c) sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran PKn, seperti ruang kelas yang memadai, tersedianya buku referensi yang cukup, adanya Laptop, LCD, dan lain-lain; serta d) program sekolah yang dapat menjamin jalannya nilai-nilai demokrasi, seperti pemilihan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka, PMI, dan Sanggar Budaya), dimana keseluruhan program tersebut dapat membentuk karakter demokratis peserta didik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya perbedaan individual peserta didik dalam mengembangkan dirinya untuk memiliki karakter demokratis.

¹ Mahasiswa Universitas Khairun

² Dosen Universitas Khairun

³ Dosen Universitas Khairun

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan watak dan karakter manusia melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Menurut Shalahuddin (1990:80) bahwa "manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan kepribadiannya serta kemampuan dan keterampilannya, secara sadar atau tidak sadar maka selama itulah pendidikan masih terus berjalan". Dalam dunia pendidikan formal diantaranya sekolah berfungsi sebagai usaha untuk mengembangkan karakter peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tidak lain mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik sebagai bekal di masa yang akan datang.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrumen pendidikan memiliki tanggung jawab mengembang amanah pendidikan dimana membentuk watak dan karakter bangsa demi kehidupan warga negara yang demokratis. Menurut Noe, hasmawati, & Rumkel (2021:42) bahwa "PKn di sekolah sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter siswa, seperti bersikap demokratis terhadap pandangan yang berbeda, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta sebagai upaya mencegah meluasnya kerusakan moral siswa". Sedangkan menurut Soemantri (2001) bahwa "PKn diselenggarakan guna melatih peserta didik/siswa untuk berpikir, kritis, analitis, berpikir dan bertindak dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Oleh sebab itu PKn merupakan mata pelajaran yang ada di sekolah yang memiliki peran agar dapat menumbuhkan karakter demokratis peserta didik di sekolah hingga diimplementasikan juga di luar sekolah.

Nilai-nilai demokrasi harus terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik yang diaktualkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam kelas, organisasi maupun kegiatan di luar sekolah yang harus dibiasakan sejak dini. Di mulai dari sikap mengakui dan menghormati adanya perbedaan, menerima perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kebebasan. Namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor aturan yang

berlaku, sebagaimana menurut Suhyahno (2012) bahwa “demokrasi itu ada kaitannya dengan nilai-nilai kebebasan, tetapi kebebasan tersebut sesuai peraturan yang telah berlaku”.

Namun realitanya masih cukup banyak ditemukan peserta didik yang kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah. Hal ini sebagaimana yang terlihat pada SMP Negeri 4 Kota Ternate, diantaranya terlihat dari kurangnya peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat pada saat proses pembelajaran berlangsung akibat tidak adanya rasa percaya diri, perasaan malu dan kurang berani di dalam mengemukakan pendapat. Selain itu, kurangnya motivasi dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebaya seperti bergabung dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler karena rasa malas jika harus berlama-lama di sekolah. Lalu kurangnya pemahaman siswa dalam menentukan hak dan kewajibannya, seperti menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua OSIS sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di sekolah.

Fenomena tersebut harus menjadi perhatian semua pihak (*stakeholder*) di sekolah, baik Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kesiswaan, dan para guru, terutama guru PPKn. Guru PPKn harus membelajarkan kepada peserta didik mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam kegiatan di sekolah demi membentuk karakter mereka sendiri, sebagaimana pernyataan Komalasari (2011) bahwa “proses pembelajaran sekolah yang berkualitas adalah proses pembelajaran peserta didik untuk aktif dalam kegiatan sekolah”. Hal demikian diperkuat dengan pernyataan oleh Mudjiono (2006) bahwa “proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik, proses tersebut diakhiri dengan evaluasi hasil belajar”. Maksudnya proses pembelajaran perlu melibatkan peserta didik secara optimal sehingga dapat membentuk karakter yang baik (*good character*) peserta didik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKN maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian di sekolah dengan judul yaitu “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VII SMP Negeri 4 Kota Ternate”. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para guru PPKn pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKN demi pembentukan karakter demokratis peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ternate. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana menurut Sugiyono (2013:15) merupakan “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah”. Sedangkan menurut Nasution (2003:5) bahwa “penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kurikulum, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga tahapan yakni observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2007:21-22) yaitu “reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi”. Reduksi data maksudnya peneliti dalam menganalisis data perlu melakukan pengelompokan data seperti memilah dan memilih data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Dari hasil ini lalu disajikan/diuraikan dalam bentuk tulisan yang baik sehingga diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu faktor pendukung terlaksananya nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn dengan baik di SMP Negeri 4 Kota Ternate karena adanya sikap saling menghargai dan mendukung antara guru dan peserta didik. Sikap yang dimaksud seperti kebebasan dalam berpendapat dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, memiliki kepercayaan diri, serta aktif berpartisipasi dan bekerjasama. Berbagai sikap tersebut merupakan aspek yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru senantiasa menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan memperlihatkan kesantunan dan kedewasaan dalam menangani serta memecahkan setiap persoalan yang dihadapi. Kerja sama yang dibangun harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan sehingga muncul kepercayaan diri dan kebebasan dalam berekspresi yang merupakan hak dasar setiap manusia dalam negara demokrasi.

Pentingnya kerja sama dapat mengatasi berbagai tugas atau persoalan serta memadukan karakter peserta didik yang berbeda agar saling peka dan peduli satu sama lain. Misalnya, ketika dilaksanakan diskusi kelompok melalui pembelajaran PKn maka biasanya guru akan memberikan tugas kelompok untuk dipecahkan oleh peserta didik secara berkelompok. Kalau ada salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan maka teman satu kelompok lainnya akan membantu sehingga kesulitan tersebut dapat teratasi sesegera mungkin. Dalam kerja sama juga akan terbangun saling tukar pikiran sesama peserta didik dalam mengerjakan tugas.

Setiap peserta didik dalam berkelompok atau berorganisasi harus dijamin kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Pendapat dapat berupa masukan atau saran maupun kritikan yang bersifat membangun (konstruktif) sehingga membuahkan hasil diskusi yang menarik dan berkualitas. Hal demikian dapat membentuk karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu disini dituntut peran guru dalam mengatur diskusi agar berjalan lancar dan efektif. Peran guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi, memberikan petunjuk/arahan dengan tetap mengontrol jalannya diskusi, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk berpartisipasi berupa memberi pertanyaan atau tanggapan. Hal tersebut menurut pendapat Zein (2016:79) bahwa “peranan guru adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar”.

Salah satu nilai demokrasi lainnya yakni kebebasan. Kebebasan dalam berorganisasi di sekolah sangat dibutuhkan untuk proses belajar peserta didik. Organisasi seperti OSIS sebagai wahana untuk pengembangan karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu keterlibatan peserta didik dalam organisasi sangat penting. Mereka dapat melatih kepercayaan diri, mempelajari bagaimana dalam memberikan suara pada pemilihan umum (contoh OSIS dan perangkat kelas), belajar dalam mengambil keputusan bila diperhadapkan dengan sebuah tugas atau masalah, belajar mengelola suatu kegiatan dengan saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Menurut Supriatna (Toni, 2019:57) bahwa “OSIS memiliki peranan diantaranya: 1) sebagai wadah dalam melatih kepemimpinan siswa, 2) sebagai penggerak dan motivator dimana merangsang lahirnya keinginan untuk berpartisipasi, dan 3) sebagai preventif artinya dapat mencegah siswa dari berbagai perilaku menyimpang”.

Sikap berani dan percaya diri dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kelas dan organisasi sangat menentukan kualitas karakter demokratis, sebaliknya rasa takut,

inferior, serta curiga terhadap orang lain hanya akan melemahkan kualitas karakter demokratis itu sendiri, serta berpotensi menciptakan hubungan yang kurang harmonis sesama peserta didik. Menurut Akhwani, Nafiah, dan Taufiq (2021:1) bahwa “implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan (*habituation*) dilakukan dengan membiasakan siswa memiliki sikap toleransi, menghargai, tidak menjadi perbedaan sebagai alasan terpecah belah, terbiasa mengambil keputusan secara musyawarah dengan siapa saja dan memiliki solidaritas yang tinggi”. Nilai-nilai Pancasila terinternalisasi ke dalam karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu, sikap berani dan percaya diri harus ditumbuhkan dalam diri setiap peserta didik. Pembiasaan (*habituation*) dalam menerima dan mengerjakan tugas apapun baik dari guru seperti tugas pribadi dan kelompok, maupun tugas dari organisasi berupa kepanitiaan dan kepengurusan harus dilakukan secara mandiri dan tanggung jawab.

Selain pembiasaan, perlu juga keteladanan dari seorang guru. Guru harus memberikan contoh kepada peserta didik baik aspek penguasaan pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan dalam mendidik. Apalagi sebagai guru PPKn yang dituntut memiliki karakter yang baik (*good character*). Sebab guru itu digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Menurut Cahyaningrum, Sudaryanti, & Purwanto (2017:208) bahwa “sebagai seorang teladan bagi siswanya, guru memiliki beberapa peran, diantaranya: 1) guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk membangun karakter, 2) guru memiliki tanggung jawab penuh untuk menjadi model dalam memperagakan perilaku baik yang dicontohkan kepada siswanya, 3) guru melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangan karakter pada siswanya, dan 4) guru berperan aktif dalam mengedukasi kepada siswa tentang nilai-nilai baik yang perlu diterapkan dan juga nilai-nilai buruk yang harus ditinggalkan”.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn membutuhkan kerja sama yang baik antara peserta didik, guru dan pimpinan sekolah. Karena merekalah yang memiliki peran penting dalam menyukseskan penanaman nilai-nilai demokrasi pada peserta didik, seperti proses pembelajaran yang berjalan efektif dan kondusif, saling menghargai dan menghormati orang lain, saling menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, dan lain sebagainya. Nilai-nilai demokrasi yang dibelajarkan akan tertanam dengan baik kepada peserta didik, seperti saling menghargai dan menghormati perbedaan,

berani dan percaya diri berbicara di depan umum, mampu mengambil keputusan (*decision making*) dengan mandiri dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn akan diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

1) Pendidik/Guru

Pendidik/guru sebagai orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan karakter peserta didik, termasuk karakter demokratis. Mulai dari mempersiapkan silabus, RPP, materi ajar, media pembelajaran, model dan metode pembelajaran, hingga perangkat pembelajaran. Menurut Hasbullah (2001:16-18) bahwa “pendidik dituntut bertanggung jawab terhadap anak didiknya, namun dituntut pula bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini didasarkan atas kebebasan yang ada pada dirinya untuk memilih perbuatan yang terbaik”. Kemudian menurut Wibowo (2012:45) bahwa “keteladanan guru sebagai syarat terlaksananya pendidikan karakter di sekolah”. Guru merupakan figur sehingga harus menunjukkan kompetensinya baik kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial di depan anak didiknya. Termasuk merespon sikap anak didiknya yang menyalahi aturan kelas atau sekolah, dimana guru harus memberi kesempatan anak didiknya untuk pembelaan diri dan memperbaiki kesalahan tanpa menghakimi dan memberi sanksi/hukuman kecuali jika kesalahan anak didiknya tersebut dilakukan berulang kali.

2) Anak Didik/Peserta Didik

Anak didik merupakan orang yang menerima pengaruh dari guru dalam proses pendidikan. Keseriusan dari anak didik untuk belajar mengembangkan kompetensi dirinya sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik tersebut. Menurut Hasbullah (2001:23) bahwa “dalam proses pendidikan, kedudukan anak didik adalah sangat penting. Proses pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang dialaminya, anak didik merupakan komponen yang hakiki”.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran PKn, seperti ruangan kelas, LCD, Laptop, serta buku referensi.

Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung suasana belajar yang menghasilkan pembelajaran tidak monoton dan menjenuhkan bahkan berpeluang kreatif, menarik dan penuh tantangan bagi peserta didik. Menurut Adeolu dan Modupe (Putra dan Afriansyah, 2019:1) bahwa “sarana dan prasarana pembelajaran sekolah mengacu pada lokasi, bangunan, perabot dan peralatan yang berkontribusi terhadap lingkungan belajar positif dan pendidikan berkualitas bagi semua siswa”.

4) Program Sekolah

Sekolah harus memiliki program-program yang dapat mengembangkan karakter peserta didik. Program tersebut dapat mendorong proses pencerdasan dan pendewasaan peserta didik. Adapun program di SMP Negeri 4 Kota Ternate yaitu memaksimalkan peran organisasi OSIS dan ekstrakurikuler itu sudah sangat tepat. Dalam hal ini, pemilihan ketua OSIS dan ekstrakurikuler yang terus berjalan dan berkembang di setiap tahunnya. Program sekolah merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya implementasi nilai-nilai demokrasi dimana program sekolah seperti pemilihan ketua OSIS dan ekstrakurikuler dapat membentuk penanaman karakter peserta didik. Tentunya pelaksanaan program tersebut perlu mendapat dukungan dan pengawasan dari guru-guru dan pimpinan sekolah agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan perpecahan di kalangan siswa.

5) Kepemimpinan

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah pendidikan yaitu faktor kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan menurut McShane dan Von Glinow (2009: 231) adalah *“leadership, influencing, motivating, and enabling others to contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are members”*, artinya pemimpin, mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi dimana mereka menjadi anggotanya. Kemudian menurut pendapat Starling (2008: 351), “kepemimpinan yaitu suatu proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok dalam upaya ke arah pencapaian tujuan organisasi dalam sebuah situasi yang diberikan”. Kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri 4 dapat dijadikan panutan bagi peserta didik dan guru, dimana senantiasa mengajak peserta didik dan para guru untuk berinteraksi. Selain itu, mendorong para peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler,

sedangkan guru senantiasa dirangkul, dibimbing, dan dimonitor dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan pendampingan peserta didik di luar kelas. Oleh karena itu, peran kepemimpinan kepala SMP Negeri 4 Kota Ternate sangatlah besar dalam membentuk karakter demokratis peserta didik dan guru.

b. Faktor Penghambat

1) Lingkungan

Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap peserta didik dimana lingkungan yang bagus akan saling mendukung satu sama lain, saling bekerja sama, menghargai dan menghormati orang lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tentu berpengaruh positif terhadap pengembangan karakter dan prestasi peserta didik, sebaliknya jika lingkungannya buruk maka peserta didik cenderung melakukan perilaku negatif, seperti berkelahi, tawuran, *bullying*, bolos, tidak mematuhi tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Menurut Sartain dalam Hasbullah (2001:32) bahwa “lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes*”.

Selain di sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat juga mempengaruhi peserta didik bahkan lebih besar pengaruhnya terhadap perkembangan karakter demokratis peserta didik. Oleh karena itu pendidikan informal sangat dibutuhkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokratis kepada peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas bahwa “pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri”.

Jika di SMP Negeri 4 Kota Ternate, dukungan keluarga masih belum optimal, seperti kurangnya bimbingan dan perhatian kepada peserta didik karena kesibukan dengan rutinitas kerja sehari-hari yang akhirnya mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan dalam belajarnya. Fenomena ini harus segera diselesaikan dengan keterlibatan Kepala Sekolah dan guru-guru untuk mensosialisasikan kepada orang tua melalui rapat. Orang tua dan masyarakat harus turut serta mendukung pengembangan karakter demokratis peserta didik yang lebih baik.

2) Perbedaan individual

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga seorang pendidik/guru tidak boleh menyamaratakan peserta didiknya. Guru harus mampu membaca perbedaan tersebut sehingga pendekatan dalam mendidik juga perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Perbedaan ini telah menjadi kodrat setiap manusia, sekalipun anak kembar. Menurut Hamalik (2004:180) bahwa “setiap individu memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu yang sama, satu dengan yang lainnya berbeda”. Lalu menurut Rohani (2004:25) bahwa “individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri”.

Adapun fenomena di SMP Negeri 4 Kota Ternate dimana terdapat beberapa peserta didik yang kemampuannya berbeda-beda, ada yang cepat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga muncul keberanian dan percaya diri untuk terlibat dalam kegiatan diskusi dan organisasi, namun ada juga yang memiliki kemampuan rendah dalam berpartisipasi karena tingginya rasa malu dan takut untuk menunjukkan dirinya di depan umum. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu penghambat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn, diantaranya: 1) membiasakan peserta didik untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap tugas kelompok, 2) melalui diskusi kelompok, peserta didik diberi ruang untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, berpikir kritis, berani, terbuka, dan percaya diri, saling menghargai pendapat atau keberagaman, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, 3) mendorong dan menjamin kebebasan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, seperti pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua PMR, ketua Pramuka, dan lain sebagainya;

Kedua, Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu: 1) adanya pendidik yang memiliki kompetensi baik kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, maupun sosial; 2) peserta didik yang memiliki keseriusan untuk pengembangan kompetensinya; 3) sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran PKn, seperti ruang kelas yang memadai, tersedianya buku referensi yang cukup, adanya Laptop, LCD, dan lain-lain; 4) program sekolah yang dapat menjamin

jalannya nilai-nilai demokrasi, seperti pemilihan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler (Pramuka, PMI, dan Sanggar Budaya), dimana keseluruhan program tersebut dapat membentuk karakter demokratis peserta didik. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya perbedaan individual peserta didik dalam mengembangkan dirinya untuk memiliki karakter demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Ahmad Rohani. (2004). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhwani, A., Nafiah, N., & Taufiq, M. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 6(1), 1-10.
- Hasbullah.(2001). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Cahyaningrum, E. S., Sudaryanti, S., & Purwanto, N. A. (2017). Pengembangan nilai-nilai karakter anak usia dini melalui pembiasaan dan keteladanan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 203-213.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineke Cipta
- Hamalik, Oemar. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasbullah.(2001). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komalasari, Kokom. (2011). *Pembelajaran Kontekstual*. Bandung: Refika Aditama.
- McShane, S. L. and Glinow, M. A. (2009). *Organizational behavior*. (second edition). New York: McGraw-Hill International.
- Miles dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noe, W., Hasmawati, H., & Rumkel, N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Menurut Pemikiran Udin S. Winataputra. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1).
- Putra, A. D., & Afriansyah, H. (2019). Pentingnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa SMAN 16 Tebo.
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Shalahuddin, Mahfud. (1990). *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Surabaya : Bina Ilmu
- Starling, G. (2008). *Managing the public sector*. USA: Thomson Wadsworth.
- Soemantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Toni, I. A. (2019). Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Dalam Memebentuk Karakter Siswa Di Smk Negeri 2 Salatiga. *Satya Widya*, 35(1), 54-61.
- Wibowo (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zein, M. (2016). Peran guru dalam pengembangan pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 274-285.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.